

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintahan (NGO) telah berperan besar dalam mendorong reformasi dan menjatuhkan pemerintahan otoriter Orde Baru. Kelompok atau gerakan masyarakat memperlakukan organisasi sebagai salah satu sarana perjuangan untuk mencapai tujuan atau saran yang disepakati. Namun, dilihat dari pertumbuhan masyarakat sendiri, telah memperlihatkan bahwa semakin kompleks masyarakat yang antara lain diperlihatkan oleh persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan yang semakin banyak jumlahnya, menimbulkan tingkat keperluan dan kesadaran berorganisasi dikalangan masyarakat Indonesia.

Berbagai nama organisasi masyarakat mulai bermunculan, Khususnya di Bali, salah satunya adalah Organisasi Masyarakat Laskar Bali yang menjadi objek dalam penelitian ini. Adanya relasi atau hubungan yang terjalin antara pengurus maupun anggota organisasi masyarakat dengan kelompok elit yang ada di dalam pemerintahan akan memunculkan sebuah hubungan yang menyebabkan organisasi masyarakat tersebut tidak berjalan sesuai dengan visi dan misi yang menjadi dasar terbentuknya organisasi masyarakat tersebut.

Hubungan yang terjalin diantara organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan di Bali, baik yang memiliki latar belakang di pemerintahan hingga militer pada saat terjadi sebuah pemilihan

kepala daerah bagaikan sebuah hubungan *simbiosis*. Bagi individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan di dalam pemilihan kepala daerah ini, menjelang pemilihan kepala daerah berlangsung, organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi lahan perebutan untuk mendapatkan dukungan politik. Karena ketika individu maupun kelompok dapat memiliki relasi yang kuat dengan sebuah organisasi masyarakat, maka mereka dapat menyusupkan kepentingannya ke dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan harapan dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat sehingga memilih kandidat yang diusung di dalam pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan Gubernur Bali 2013.

Terdapat 18 persyaratan yang harus dipenuhi organisasi masyarakat di dalam pembentukannya, di antaranya yaitu memiliki sertifikat pendirian dari notaris, minimal memiliki tiga cabang atau kesekretarian di tiga kabupaten dan kota, memiliki sarana dan prasarana serta memiliki tujuan dan program kerja. Ormas dibentuk bukan untuk tujuan politik, karena sejatinya ormas dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan dan sosial.¹

Di Indonesia telah diberlakukan undang-undang yang mengatur mengenai organisasi masyarakat yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1985 . Dengan adanya undang-undang ini, maka seharusnya para anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) harus bisa menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dan diberlakukan.

¹ Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Topik penelitian ini bukanlah menjadi topik yang pertama, namun ada beberapa topik penelitian terkait dengan penelitian ini. Seperti penelitian yang di angkat oleh M. Zulkaraen Reno (2008), dimana hubungan organisasi gerakan mahasiswa terhadap perubahan pergantian kepemimpinan dan menjelaskan keterkaitan hubungan para elite politik. Fenomena dalam penyelenggaraan Pilgub di daerah khususnya di Jawa Timur Tahun 2008, menuai banyak respon dari masyarakat termasuk Mahasiswa, terutama mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Peranan mahasiswa dalam perubahan sosial politik, Negara tidak bisa diabaikan oleh gerakan politik manapun, terutama di berbagai Negara berkembang, khususnya Indonesia, Gerakan mahasiswa tetap menjadi salah satu kekuatan politik yang memiliki daya pengaruh yang kuat bagi pembentukan paradigma berpikir masyarakat. Penelitian ini menjelaskan perilaku politik seluruh warga GMNI didalam hubungan kontestasi kekuasaan pada proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan di Jawa Timur²

Untuk topic penelitian selanjutnya, membahas tentang Organisasi Masyarakat Betawi dan pencaturan politik daerah Ibukota Jakarta dalam studi tentang pra pemilihan gubernur daerah khusus ibukota Jakarta tahun 2007. Topik penelitian tersebut menjelaskan bahwa Orang Betawi yang dipersepsikan sebagai suku asli penduduk Jakarta dan menjadi simbol sebuah identitas penduduk serta simbol ini ramai diperebutkan oleh elit-elit Betawi yang mendirikan organisasi massa dengan label kebetawian. Simbol Betawi ini menjadi komoditas bagi

² Reno, M. Zulkarnaen. 2009. Perilaku politik warga GMNI Jawa Timur pada pemilihan Gubernur tahun 2008, studi analisis kualitatif pola perilaku politik warga GMNI Jatim pada proses pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008 [skripsi]. Program Sarjana. Universitas Airlangga. Surabaya.

penguasaan sumber-sumber ekonomi dan politik oleh elit Betawi. Ormas Betawi menjadi elemen penting dalam proses-proses politik yang terjadi, seperti dukungan Lobby, pressure dll. Ormas Betawi menjadi simbol dari representasi orang betawi ini kemudian menjadi alat untuk membentuk wacana dimana figure calon Gubernur yang didukung ormas Betawi seolah-olah merupakan representasi orang Betawi.³

Peran Organisasi masyarakat (Ormas) sangat menentukan arah demokrasi di Indonesia. Ormas-ormas yang mewakili berbagai kepentingan dan kelompok tersebut bisa dikatakan sebagai miniature dari keberagaman luas dalam masyarakat Indonesia dan merupakan tombak ujung tombak peran masyarakat dalam Negara. Bagaimana ormas beraktifitas didalam Negara, akan menjadi model interaksi sosial politik masyarakat Indonesia yang amat majemuk dan beragam.

Berbagai fenomena yang terjadi didalam Proses pemilihan Gubernur Bali seperti dukungan dari berbagai LSM dan ORMAS di setiap kandidat untuk mengusung “Jagoannya” untuk menjadi Gubernur Bali. Begitu banyak Ormas-ormas yang bermunculan dan ikut berperan serta dalam ‘Pesta Demokrasi’ tersebut seperti, Ormas Laskar Bali turut langsung mengusung pasangan Mangku Pastika dan Sudiketa, sedangkan beberapa anggota dari BALADIKA yang mengusung pasangan Pupayoga-Sukrawan, Pemuda Bali Bersatu, Forum Peduli Bali, Banzer, Satria Muda Majapahit, dll. Keterlibatan langsung Ormas Laskar Bali dalam proses Pilgub Bali tahun 2013 menjadi fokus dalam penelitian ini

³ Afrianto, Vicky. 2006. Organisasi Masyarakat Betawi dan Pencaturan Politik Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Studi tentang pra pemilihan Gubernur Daerah Khusus ibukota Jakarta tahun 2007 [skripsi]. Program Sarjana. Universitas Airlangga. Surabaya.

Sebab, dalam keterkaitannya di Pilgub Bali 2013, Laskar Bali mengaku telah memiliki Strategi kusus dalam memenangkan salah satu kandidat. Ormas Laskar Bali merupakan Ormas pertama yang muncul dan bisa dikatakan sebagai *Penua*⁴ dari Ormas-ormas lainnya.

Fenomena lain terjadi saat Pemilihan Gubernur Bali yang dilaksanakan pada 15 Mei 2013 lalu berhasil membawa pasangan Mangku Pastika dan Sudikerta resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2013. Pasangan tersebut memperoleh suara sebanyak 1.063.734 suara atau 50,02 persen dari total 2.126.472 Sedangkan lawannya yaitu PAS memperoleh total 1.062.738 suara (49,98 persen) hanya selisih 996 suara.⁵ Keberhasilan dan kemenangan dari pasangan Mangku Pastika dan Sudikerta tidak luput dari peran dan dukungan serta Ormas Laskar Bali yang bisa dikatakan berpartisipasi dan berperan dalam kemenangan Mangku Pastika dan Sudikerta. Peran dan partisipasi yang dimaksud adalah peran dalam pengumpulan massa dan keamanan. Organisasi Masyarakat Laskar Bali bertekad memenangkan pasangan Mangku pastika dan Sudikerta pada Pilgub Bali 2013. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Laskar Bali, Ketut Rochineng. Rochineng mengaku, sebagai ormas, Laskar Bali mendukung pasangan tersebut karena memiliki visi dan misi yang sama. Disamping itu Rochineng menjelaskan bahwa Organisasinya tidak akan berafiliasi terhadap parpol manapun, posisinya sebagai Sekjen Laskar Bali membebaskan anggota-anggotanya untuk mendukung siapapun tetapi dalam pernyataannya tersebut,

⁴ Penua diartikan dalam kalimat ini sebagai Yang Pertama, Yang tertua dan memiliki banyak pengalaman.

⁵ Suara Pembaruan. 2013, *Pasti-Kerta Menang Tipis Pilgub Bali*. diakses pada tanggal 15 Mei 2014 pukul 23:15 WIB, dari <http://www.suarapembaruan.com/home/pasti-kerta-menang-tipis-pilgub-bali/36004>

Rochineng yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali menegaskan, Organisasinya sendiri sudah menyiapkan strategi khusus untuk memenangkan pasangan Mangku Pastika dan Sudikerta, tetapi Rochineng belum bersedia untuk membeberkan strategi apa yang direncanakan di dalam Organisasinya untuk memenangkan Pasti-Kerta. Rochineng juga mengaku, Organisasinya sangat siap untuk memenangkan paket Pasti-Kerta.⁶ Mendengar pengakuan Rochineng di media atas dukungannya terhadap pasangan Pastika dan Sudikerta, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) segera memanggil Rochineng untuk mengklarifikasi pernyataannya di media terkait dukungannya terhadap pasangan Pastika dan Sudikerta. Setelah Rochineng mengklarifikasi pernyataannya dengan mengatakan bahwa dukungan yang ia ucapkan itu adalah selaku Sekjen Laskar Bali bukan sebagai Kepala BKD Bali.⁷ Dukungan Laskar Bali tersebut dibuktikan melalui dukungan melalui Baliho yang cukup besar di setiap titik-titik strategis di kota Denpasar dan daerah lainnya.⁸

Setelah melihat dan meninjau fakta yang ada di Bali sekarang ini, peneliti melihat munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi serta menimbulkan berbagai pertanyaan bagi peneliti yang berkaitan dengan eksistensi serta keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) Laskar Bali di dalam proses Pemilihan Gubernur Bali 2013.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka timbul pertanyaan yang akan dikemukakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepentingan apa saja yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat Laskar Bali dalam pemilihan Gubernur Bali 2013?
2. Bagaimana dinamika internal di dalam Organisasi Masyarakat Laskar Bali?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh organisasi masyarakat Laskar Bali dalam pemilihan Gubernur Bali 2013.
2. Untuk mengetahui dinamika internal yang terjadi di dalam organisasi masyarakat Laskar Bali.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yaitu :

1. Peneliti melakukan penelitian ini dengan harapan agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui kepentingan-kepentingan yang dimiliki Ormas Laskar Bali dalam keterlibatannya di Pilgub Bali 2013.
2. Peneliti melakukan penelitian ini dengan harapan agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui dan memahami, bagaimana dinamika Internal dalam organisasinya.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. *Theory Pluralism dalam konteks Voluntary Organisations*

Untuk mempelajari kelompok politik maka kita bisa mendapatkan literature dari tiga teori besar utama, yaitu teori pluralis, Marxist atau teori elit dan teori *civil society* atau teori masyarakat sipil. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pluralis sebagai kerangka teori sebagai teori yang menjadi dasar penelitian ini yang berasal dari buku *Foundations of Comparative Politics Cambridge Textbooks in Comparative Politics*.

Ketika berbicara mengenai eksponen utama dari teori pluralis, maka kita bisa melihat Robert Dahl berargumen *that pluralist democracy does not work in a perfect "textbook" manner, but it works reasonably well.*⁹

Robert Dahl berpendapat jika demokrasi pluralis tidak bekerja dengan cara-cara yang ada di dalam buku, namun hal ini tetap bekerja dengan cukup baik. Pada dasarnya, teori pluralis menyatakan jika kebanyakan isu-isu politik yang ada berasal dari kelompok-kelompok yang bersaing antara satu sama lain. Biasanya, salah satu dari kelompok yang bersaing ini memiliki kekuatan yang lebih sehingga bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kelompok kepentingan yang ada memiliki sumber daya yang menjadi kekuatan mereka ketika bersaing dengan kelompok yang lain, seperti popularitas, keterampilan dalam kepemimpinan, dukungan dari masyarakat. Dalam kelompok kepentingan, semua kelompok memiliki beberapa sumber daya yang menjadi kekuatan mereka, namun

⁹Ken Newton&Jan W. Van Deth.*Foundations of Comparative Politics Cambridge Textbooks in Comparative Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Hlm. 176

yang bisa dikuasai oleh mereka hanya beberapa, bukan secara keseluruhan. Di dalam persaingan yang terjadi diantara kelompok kepentingan, tidak ada kelompok yang paling berkuasa namun tidak ada kelompok yang paling lemah.

Dalam teori pluralis, tidak akan ada elit yang akan selalu berkuasa. Akan selalu terjadi pergeseran kekuasaan dengan permasalahan dan keadaan yang berbeda. Hari ini dapat menjadi pemenang, namun dihari selanjutnya bisa menjadi pecundang, dan sebaliknya. Ketika suatu kelompok kepentingan mengalami kegagalan, maka sering kali kelompok ini akan mencari kelompok lain yang dapat diajak untuk berkompromi dan bekerja sama untuk menghimpun sebuah kekuatan. Suatu kelompok tidak selalu bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan tetapi dapat menjatuhkan kelompok lain yang tidak mereka sukai.

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Eksistensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Eksistensi adalah keberadaan wujud yang tampak, adanya sesuatu yang membedakan anatara suatu benda dengan benda lain. Eksistensi merupakan sebuah hal yang amat penting bagi sebuah organisasi masyarakat, agar dapat dikenal di dalam lingkungannya dan pada akhirnya dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya.

Menurut Zaenal, eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yang

artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya, kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.¹⁰

1.6.2. Organisasi Masyarakat

Terdapat banyak pengertian mengenai organisasi masyarakat yang dipaparkan oleh para ahli. Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut :¹¹

1. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama.
2. James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
3. Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
4. Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang

¹⁰ Awahan Zac Duerre Malfoy. 2013, *Pengertian Eksistensi dan Trend*. diakses pada tanggal 16 Mei 2014 pukul 01:15 WIB, dari <http://www.scribd.com/doc/141645215/Pengertian-Eksistensi-Dan-Trend>

¹¹ Dino Al-Depoky. 2011, *Teori Organisasi Umum 1 (Arti Penting Organisasi dalam Masyarakat)*, diakses pada tanggal 16 Mei 2014 pukul 01:45 WIB, dari <http://dino-al-depoky.blogspot.com/2012/10/teori-organisasi-umum-1arti-penting.html>

relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Ada beberapa prinsip dari sebuah organisasi yaitu : ¹²

1. Bahwa Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas, ini hal mutlak yang harus dimiliki sebuah organisasi, mau dibawa kemana suatu organisasi ini, sehingga organisasi harus punya misi dan visi yang jelas agar tidak berhenti di tengah jalan.
2. Bahwa harus ada kepemimpinan, hal ini penting agar sebuah organisasi dapat berjalan di bawah koordinasi, perintah, pengawasan yang tepat.
3. Bahwa harus ada pembagian pekerjaan, hal ini penting karena organisasi terdiri dari berbagai struktur anggota di dalamnya, dan setiap anggota mempunyai tugas masing-masing.
4. Bahwa organisasi harus ada tanggung jawab, sebuah organisasi merupakan tanggung jawab semua elemen di dalamnya, bukan hanya tanggung jawab ketua/pemimpin, tapi merupakan tanggung jawab bersama.

Herbert G. Hicks mengemukakan dua alasan mengapa orang memilih untuk berorganisasi, yaitu:

- a. Alasan Sosial (social reason), sebagai “zoon politicon” artinya makhluk yang hidup secara berkelompok, maka manusia akan merasa penting berorganisasi demi pergaulan maupun memenuhi kebutuhannya. Hal ini

¹² *Ibid.*

dapat kita temui pada organisasi-organisasi yang memiliki sasaran intelektual, atau ekonomi.

- b. Alasan Materi (material reason), melalui bantuan organisasi manusia dapat melakukan tiga macam hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri yaitu: 1) Dapat memperbesar kemampuannya 2) Dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran, melalui bantuan sebuah organisasi. 3) Dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telah dihimpun.

Organisasi dalam masyarakat mempunyai peranan penting dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat yang diwadahi oleh organisasi masyarakat tersebut. Di samping itu dengan adanya organisasi akan memudahkan masyarakat untuk menyalurkan suara daripada dilakukan sendiri-sendiri. Dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas ke masing-masing pengurus organisasi maka apabila ditemukan kesulitan dalam berorganisasi dapat diselesaikan bersama.¹³

Dari segi keterlibatan masyarakat didalam organisasi, dapat dibedakan antara organisasi sosial, budaya dan agama yang melibatkan masyarakat secara luas dan jauh melebihi batas normal organisasi dengan organisasi yang hanya menyertakan masyarakat berdasarkan keterikatan mereka kepada struktur organisasi seperti keanggotaan dalam organisasi.

Tujuan organisasi masyarakat, pada umumnya adalah untuk memenuhi keperluan anggotanya secara umum dianggap sebagai sasaran utama organisasi

¹³ *Ibid.*

semacam itu. Untuk organisasi kemasyarakatan yang mengkhususkan aktivitasnya dalam aspek sosial (masyarakat) dari kehidupan, kesejahteraan diartikan sebagai pengembangan hubungan antar manusia secara menyeluruh yang beranjak dari pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perluasan kesempatan untuk mengamalkannya serta berkreasi di bidang ilmu dan teknologi untuk kemakmuran.

1.6.3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah pertama kali dilakukan pada Bulan Juni tahun 2005. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.¹⁴

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:¹⁵

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Didalam UU RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pengertian pemilukada adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun sejak

¹⁴ Wikipedia. 2014, *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, diakses pada tanggal 16 Mei 2014 pukul 02:14 WIB, dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia

¹⁵ *Ibid.*

ditetapkannya UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu istilah Pemilukada diuraikan langsung sehingga menjadi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Untuk pelaksanaan UU RI Nomor 15 Tahun 2011, khususnya tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota belum diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait erat dengan persoalan tersebut, antara lain; UU RI Nomor 32 tahun 2004 dan perubahannya, PP Nomor 6 tahun 2005 dan perubahannya, dan Peraturan-peraturan KPU. Peraturan KPU tentang pemilukada pada tahun 2012, hanya satu yang telah ditetapkan, yaitu: Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kemendagri, 2006. *Tatacara dan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, diakses pada tanggal 16 Mei 2014 pukul 13:00 WIB, dari

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan tentang eksistensi organisasi masyarakat Laskar Bali teradap proses pemilihan gubernur Bali tahun 2013. Penelitian deskriptif adalah suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan.¹⁹

1.7.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana eksistensi Organisasi Masyarakat Laskar Bali dalam proses pemilihan Gubernur Bali.”

1.7.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

<http://www.kemendagri.go.id/news/2006/05/05/tatacara-dan-mekanisme-pemilihan-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah-oleh-direktur-jenderal-otonomi-daerah-departemen-dalam-negeri>

¹⁹ David Marsh, Gerry Stocker. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media. Hlm. 74

Penelitian ini dilakukan di Bali tepatnya di Koperasi Pasar, Post-post Korlap Laskar Bali yang tersebar di beberapa daerah. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti untuk mempermudah dalam hal pengambilan data dan penguasaan daerah ketika terjun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian.

Waktu penelitian yang digunakan mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan skripsi adalah pertengahan Bulan April hingga pertengahan bulan Juni tahun 2014.

1.7.4. Subjek Penelitian

Penelitian ini tertuju kepada Penasehat/Sekjen dari Organisasi Masyarakat Laskar Bali dan KORLAP-KORLAP atau DPC di setiap Pos Laskar Bali yang tersebar di beberapa daerah di Bali. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah peneliti mendapatkan data tentang variabel yang penelitian amati.

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Untuk menentukan informan yang dibutuhkan, peneliti harus bisa memastikan bahwa informan tersebut mampu memberikan informasi secara baik dan paham mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

Penentuan Jumlah Informan ditetapkan sebanyak 5 Orang, yaitu :

No.	Nama Informan	Institusi/Jabatan
-----	---------------	-------------------

1.	A.A. Suma Widana	Kepala Koperasi Pasar, Posisi Penasihat Laskar Bali
2.	Ketut Rochineng	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Bali, Posisi Sekertaris Laskar Bali
3.	Komang Agung Mahendra	Korlap Gajah Mada Denpasar
4.	I Gusti Agung Iryawan	Ketua Korlap Alas Kedaton Tabanan
5.	Kadek Darmaja	Anggota PANWASLU Pilgub Bali 2013

1.7.5. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian mengenai Organisasi Masyarakat Laskar Bali dalam proses pemilihan Gubernur Bali tahun 2013 adalah para pengurus Organisasi Masyarakat Laskar Bali seperti Ketua umum, Sekjen dan Korlap atau DPC yang tersebar di beberapa daerah di Bali yang dapat memberikan informasi tentang keterlibatan Ormas Laskar Bali terhadap proses pemilihan Gubernur Bali.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan untuk kepentingan penelitian ini adalah teknik pengumpulan data secara Kualitatif, yaitu wawancara mendalam dan langsung kepada informan yang dapat dilakukan di beberapa tempat seperti Pos-pos Laskar Bali yang memiliki Korlap di setiap daerah di Bali. Steward (1997) menjelaskan, Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah.²⁰ Manfaat wawancara

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 104

kualitatif adalah wawancara ini akan memfasilitasi kemampuan kita untuk mendapat informasi yang tidak tercatat dalam dokumen, informasi dari kejadian dan kepribadian yang relevan.²¹ Penulis melakukan wawancara dengan informan kemudian mencatat dan mentranskrip percakapan atau informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan wawancara dengan informan, penulis menggunakan aplikasi pada handphone untuk merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung.

Untuk pemilihan narasumber dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowball*, dimana penentuan sampel informan kunci dimulai dari satu orang yang memiliki pemahaman memadai tentang permasalahan yang dikaji, kemudian orang tersebut diminta untuk memilih seseorang atau temannya untuk dijadikan informan kunci berikutnya. Data dan Informasi yang diperoleh dari para informan ini dimaksudkan untuk memperkaya data dan informasi.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan untuk kepentingan penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis ini bersumber dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan data-data sekunder yang selanjutnya untuk dilakukan interpretasi.

Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan:²²

²¹ *Ibid.*

²² Lisa Horrison. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Pernada Group.

1. Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
2. Paparan data, menyusun data dalam satu kesatuan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokkannya.

Dalam proses menganalisis data yang dilakukan pertama kali adalah mentranskrip hasil wawancara dan ditata dengan baik sesuai urutan-urutan pertanyaan permasalahan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan pemetaan dan penyederhanaan data, kemudian dilakukan penyusunan data agar tersusun rapi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil temuan data dengan menghubungkan teori yang relevan, setelah itu mulai menyusun suatu kesimpulan. Sehingga di dalam penelitian ini analisis yang dilakukan secara sistematis dengan metode kualitatif secara deskriptif terhadap eksistensi organisasi masyarakat Laskar Bali dalam proses pemilihan gubernur Bali tahun 2013.